

MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2015-2017

Oleh: Risqan Abdullah

Email: risqan146@gmail.com

Pembimbing: Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The research is motivated by issuance Regulation of the Minister of Public Works No. 20/PRT/M/2009 Regarding Guidelines for Fire Protection Technical Management in Cities. In implementing fire protection management for region that do not yet have specific regulation governing fire protection management, then the implementation of fire protection management in the region is implemented according Regulation of the Minister of Public Works No. 20/PRT/M/2009. Formulation of the problem in this research is how is the implementation of fire protection management in Pekanbaru City in 2015-2017 and what are inhibiting factors for the implementation of fire protection management in Pekanbaru City in 2015-2017. The purpose of this research is to find out implementation of fire protection management in Pekanbaru City in 2015-2017 and describe the inhibiting factors for the implementation of fire protection management in Pekanbaru City in 2015-2017. The method used in this research is descriptive research with qualitative approach method. The type of research data is primary data and secondary data. Data collection techniques in this study are interviews and documentation. Technical analysis of data used is descriptive qualitative data analysis. The results of research indicate that the implementation of fire protection management in Pekanbaru City in 2015-2017 regulated in Regulation of the Minister of Public Works No. 20/PRT/M/2009 has not been run in accordance with the contents of the regulations that should be the guidance of policy implementation by Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Pekanbaru city. The inhibiting factors in the implementation fire protection management is facilities and infrastructure are limited, deficient human resources, resistant situation and socialization has not been done optimally. The right solution to overcome these problems is increased human resources, budget, socialization activities by Pekanbaru City Government, BPBPK and Society in more responsive to fire problems.

Keywords : *Implementation, Fire Protection Management, Fire Prevention.*

Pendahuluan

Dengan berlakunya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya dan disertai pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota terdapat dalam pasal 226 ayat 1-3 di antara lain adalah kewenangan untuk mengurus sub urusan Kebakaran di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat.

Langkah-langkah penanggulangan kebakaran di lingkungan perumahan dan pemukiman telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan. Tujuan dari Manajemen Proteksi Kebakaran ini adalah untuk terwujudnya kesiapan, kesigapan, dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung, serta dinas terkait dalam mencegah, dan menanggulangi bahaya kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran merupakan pendukung tugas Walikota dalam bidang Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran.

Menurut Boedi Rijanto(2010:2) kebakaran adalah terjadinya api yang tidak dihindaki dan tidak terkendali dan selalu

merugikan, sehingga kebakaran tidak selalu identik dengan suatu api besar. Penyebab kebakaran sangat beragam diantaranya karena kelalaian, peristiwa alam, penyalaan sendiri, unsur kesengajaan. Hampir setiap peristiwa kebakaran besar terjadi karena faktor kelalaian.

Pencegahan kebakaran merupakan tahapan paling strategis karena kegiatan ini bisa mencegah atau meminimalisir kasus kebakaran. Tapi tahapan ini sering diabaikan oleh beberapa pihak. Dalam tahapan ini banyak upaya yang dapat dilakukan, misalnya membuat kebijakan, melakukan pelatihan rancang bangunan, analisa resiko kebakaran dan prosedur keselamatan. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru turut mengadakan sosialisasi melalui bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat, Lembaga Pendidikan, Fasilitas Kesehatan, Perusahaan, dan lain-lain agar masyarakat dapat mengantisipasi, serta meminimalisasi peristiwa kebakaran.

Dalam proses pemadaman api, salah satu faktor suksesnya operasi pemadaman api oleh BPBPK Kota Pekanbaru adalah waktu tanggap. Waktu tanggap ini terdiri atas waktu terima berita, waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran, waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran, dan waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melaksanakan pemadaman. Waktu tanggap ini selama 15 menit dengan rincian:

1. Waktu dimulai sejak diterimanya informasi adanya kebakaran di suatu tempat.
2. Waktu perjalanan dari pos pemadam menuju lokasi.
3. Waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan.

Pada kenyataannya mobil pemadam kebakaran tidak selalu tiba di lokasi dengan tepat waktu dikarenakan jauhnya lokasi kebakaran yang ditempuh oleh petugas pemadam kebakaran dari pos

pemadam kebakaran, padatnya jalan raya, serta lokasi kebakaran berada di daerah padat penduduk. Hal ini mengakibatkan petugas kebakaran kesulitan dalam menjangkau lokasi kebakaran dan mengatasi kebakaran, dan banyaknya keluhan masyarakat yang menilai petugas pemadam kebakaran tidak profesional.

Tabel 1 Kasus Kebakaran Bangunan di Kota Pekanbaru Tahun 2015-2017

No	Kecamatan	2015	2016	2017
1	Bukit Raya	12	5	17
2	Lima Puluh	7	5	2
3	Marpoyan Damai	21	12	21
4	Payung Sekaki	11	13	9
5	Pekanbaru Kota	7	7	6
6	Rumbai	4	6	4
7	Rumbai Pesisir	9	9	2
8	Sail	4	7	3
9	Senapelan	10	7	8
10	Sukajadi	12	11	10
11	Tampian	17	16	19
12	Tenayan Raya	24	19	12
Jumlah		138	117	113

Sumber:Olahan Penulis, 2018

Kasus kebakaran pada tahun 2015-2017 di kota Pekanbaru menurun, tapi tren menurun tersebut hanya terjadi di beberapa kecamatan diantaranya: Lima Puluh, Pekanbaru Kota, Rumbai Pesisir, Sukajadi dan Tenayan Raya. Sedangkan kecamatan lain masih fluktuatif. Kenaikan terparah terjadi pada kecamatan Bukit Raya pada tahun 2016 dengan 5 kasus menjadi 17 kasus pada tahun 2017. Kecamatan Marpoyan Damai, Tampian dan Tenayan memiliki jumlah kasus kebakaran yang tinggi dibandingkan dengan rata-rata kasus kebakaran tahunan.

Dalam rentang waktu 2015-2017 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru mencatat Kerugian Materiil yang diakibatkan oleh kebakaran pada tahun 2015 sebanyak Rp38.831.200.000,- pada tahun 2016 sebanyak Rp19.718.700.000,- dan pada tahun 2017 sebanyak Rp12.389.150.000,-. Kerugian terbesar dialami pada tahun 2015.

Peristiwa kebakaran kebanyakan terjadi karena hubungan arus pendek listrik, dikarenakan masih banyak masyarakat menggunakan kabel instalasi listrik yang berumur lebih dari 15 tahun, pemasangan sambungan listrik yang tidak sempurna oleh pemilik rumah. Rapatnya jarak antar satu bangunan dengan bangunan lainnya juga mempercepat penyebaran api.

Di dalam Renstra (Rencana Strategis) 2012-2017 BPBPK Kota Pekanbaru telah membagi Wilayah-wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) menjadi 4 wilayah rinciannya:

1. WMK 1 → meliputi Kecamatan Rumbai (128,85 km²).
2. WMK 2 → meliputi wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir (157,33 km²).
3. WMK 3 → meliputi wilayah Kecamatan Lima Puluh; Sail; Pekanbaru Kota; Sukajadi; Senapelan; Payung Sekaki; Marpoyan Damai, dan Kecamatan Tampian (152,76 km²).
4. WMK 4 → meliputi wilayah Kecamatan Tenayan Raya, dan Kecamatan Bukit Raya (193.32 km²).

Dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru diantaranya:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru yang dapat mempengaruhi kinerja personil

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru.

2. Kurangnya jumlah petugas operasional Pemadam Kebakaran serta, masih ada petugas yang belum memenuhi standar kualifikasi.
3. Lamanya waktu tempuh oleh Mobil Pemadam Kebakaran ke lokasi kebakaran yang melebihi waktu tanggap (*respond time*) selama 15 menit.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan manajemen proteksi kebakaran di Kota Pekanbaru tahun 2015-2017?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat penerapan manajemen proteksi kebakaran di Kota Pekanbaru tahun 2015-2017?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan manajemen proteksi kebakaran di Kota Pekanbaru tahun 2015-2017.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat penerapan manajemen proteksi kebakaran di Kota Pekanbaru 2015-2017.

Kerangka Teori

Manajemen Kebakaran

Kebakaran menurut Sandra Fikawati, Ahmad Syafiq dan Fatma Lestari (2012:383) adalah bentuk bencana yang sifatnya darurat dan perlu penanganan yang cepat, efisien, dan tepat. Jika tidak, kerugian yang ditimbulkan tidaklah sedikit. Kebakaran dapat dicegah dan diminimalisir dampaknya salah satunya dengan membangun suatu sistem kesiapsiagaan, *built environment* dan kewaspadaan untuk menghadapi bencana kebakaran. Sedangkan menurut Milos Nedved dalam Paimin Napitupulu (2015:30-31) kebakaran adalah suatu

kejadian yang tidak diinginkan dan kadang kala tidak dapat dikendalikan sebagai hasil pembakaran suatu bahan dalam udara dan mengeluarkan energi panas dan nyala api.

Dalam penerapan manajemen proteksi kebakaran ada tahapan pelaksanaan manajemen proteksi kebakaran. Manajemen proteksi kebakaran di perkotaan adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan tindak lanjut pada daerah perkotaan.

Ada berbagai elemen atau kegiatan kunci yang harus dijalankan dalam mengelola bahaya kebakaran menurut Soehatman Ramli (2010:139-140) yaitu sebagai berikut:

a) Pra Kebakaran

1) Kebijakan Manajemen

Program pengendalian dan penanggulangan kebakaran dalam organisasi atau perusahaan seharusnya merupakan kebijakan manajemen. Jika terjadi kebakaran, manajemenlah sebenarnya pihak yang menanggung akibat terbesar, karena mengeluarkan biaya yang sebenarnya tidak perlu digunakan untuk memperbaiki kerusakan.

2) Organisasi dan Prosedur

Untuk mengelola upaya pencegahan kebakaran diperlukan pengorganisasian yang baik misalnya dengan membentuk organisasi kebakaran, baik yang bersifat struktural maupun non struktural.

3) Identifikasi Bahaya Kebakaran

Langkah awal untuk mengembangkan sistem manajemen kebakaran adalah dengan melakukan identifikasi dan penilaian risiko kebakaran yang ada dalam organisasi. Tanpa mengetahui apa masalah atau lawan yang akan dihadapi maka program pengendalian dan penanggulangan kebakaran tidak akan

berhasil dengan baik.

4) Pembinaan dan Pelatihan

Pembinaan dan pelatihan merupakan unsur penting dalam manajemen kebakaran. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penyebab kebakaran adalah faktor manusia. Di samping sebagai penyebab, manusia juga berperan penting dalam upaya penanggulangan jika kebakaran terjadi.

5) Sarana Proteksi Kebakaran

Keberhasilan upaya penanggulangan kebakaran akan ditentukan oleh ketersediaan sarana proteksi kebakaran yang memadai. Tanpa ketersediaan sarana proteksi kebakaran, tentu upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran tidak akan berhasil dengan efektif.

6) Inspeksi Kebakaran

Untuk mendeteksi secara dini kesiapan, kelengkapan, pematuhan dan kondisi sarana, cara kerja, lingkungan dan prosedur yang berkaitan dengan kebakaran. Semua sarana fisik kebakaran, seperti alat pemadam api, harus diperiksa dan diinspeksi secara berkala misalnya setiap 6 bulan.

7) Pengendalian Bahaya/Pencegahan

Untuk meningkatkan kesadaran semua pihak mengenai bahaya kebakaran, melakukan langkah-langkah preventif untuk menghindari atau menekan risiko kebakaran.

b) Saat Kebakaran

8) Tanggap darurat

Merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana, untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tahapan ini meliputi kegiatan penyelamatan korban, harta benda dll.

c) Pasca Kebakaran

9) Penyelidikan dan Pelaporan

Setiap kejadian kebakaran harus diselidiki dan dilaporkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penyelidikan kebakaran sangat diperlukan dengan tujuan untuk mengetahui apa penyebab kebakaran sehingga dapat diambil langkah pencegahan yang tepat.

10) Audit Kebakaran

Elemen ini adalah elemen terakhir dalam manajemen kebakaran. Berbeda dengan inspeksi, audit bertujuan untuk melihat dan mengevaluasi kesesuaian sistem manajemen kebakaran dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan instansi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru.

Pembahasan

1. Penerapan Manajemen Proteksi Kebakaran di Kota Pekanbaru Tahun 2015-2017

1.1 Kebijakan Manajemen Kebakaran

Dalam pembuatan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru selalu mempertimbangkan dengan peraturan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok

Lembaga Teknis Daerah Di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru supaya tidak terjadi pertentangan di kemudian hari. Tapi untuk tahun 2015-2017 Pemerintah Kota Pekanbaru belum memiliki aturan khusus mengenai manajemen proteksi kebakaran di perkotaan, Sehingga Pemerintah Kota Pekanbaru harus mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2009 Pasal 5 ayat 2 dan 3. Seharusnya kota Pekanbaru sudah memiliki aturan khusus mengenai manajemen proteksi kebakaran di perkotaan mengingat peraturan menteri tersebut sudah ada sejak tahun 2009 dan kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau yang seharusnya menjadi contoh bagi kabupaten atau kota di provinsi Riau.

1.2 Organisasi dan Prosedur

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru pada tahun 2015 memiliki 144 personil operasional dan 40 personil bagian administrasi/kantor jadi total dalam tahun 2015 jumlah personil BPBPK Kota Pekanbaru berjumlah 184 Personil dalam *Pekanbaru Tribunnews* (2015). Pada tahun 2016 tidak ada penambahan personil. Dan pada tahun 2017 dalam *Segmennews* (2017) jumlah personil Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru berjumlah 215 personil dengan pembagian 185 personil operasional dan 30 personil administrasi/kantor.

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru membutuhkan petugas operasional pemadam kebakaran sebanyak 504 orang, sedangkan petugas yang ada hanya sebanyak 185 orang pada tahun 2017. Serta perlu diadakan pendidikan dan pelatihan kepada personil-personil Badan Penanggulangan Bencana dan pemadam kebakaran Kota Pekanbaru.

Untuk pelaksanaan *Standart Operating Procedure* (SOP) perlu ditingkatkan lagi karena masih ada kasus

kebakaran yang waktu tanggapnya / *respond time* melewati 15 menit seperti kasus kebakaran pada tanggal 8 November 2017 pada pukul 22.30 Wib di jalan Obor Kecamatan Tenayan Raya waktu tanggapnya mencapai 35 menit. Dan pada 11 November 2017 pada pukul 21.20 Wib di jalan SM. Amin waktu tanggap mencapai 20 menit.

1.3 Identifikasi Bahaya Kebakaran

kebanyakan kasus kebakaran bangunan yang teridentifikasi yang terjadi di Kota Pekanbaru disebabkan oleh korsleting arus listrik, beberapa kasus disebabkan oleh gas LPG yang bocor, dan masih banyak kasus yang masih dalam proses penyelidikan. Untuk identifikasi bahaya kebakaran belum berjalan dengan optimal karena masih banyak kasus kebakaran yang belum teridentifikasi walaupun beberapa kasus sudah diketahui penyebabnya.

1.4 Pembinaan dan Pelatihan

Pada tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kota Pekanbaru melaksanakan Program Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Dini dan Evakuasi Korban Kebakaran yang di ikuti oleh 400 orang perwakilan dari setiap kelurahan di kota Pekanbaru. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kota Pekanbaru juga melakukan Pelatihan Swadaya ke Lembaga Pendidikan, lembaga Kesehatan, Perusahaan, dan lain-lain. Pelatihan ini diikuti oleh berbagai latar belakang diantaranya lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, perusahaan. Dengan rincian tahun 2015 diikuti oleh 28 lembaga, perusahaan dll dengan jumlah 1170 peserta. Tahun 2016 diikuti oleh 24 lembaga 2599 peserta. Tahun 2017 diikuti oleh 31 lembaga 2345 peserta.

Tahun 2015-2017 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru melaksanakan pelatihan di tingkat personil diantaranya

Diklat Pemadam I (satu) yang telah diikuti oleh 90% personil pemadam kebakaran, Diklat Pemadam II (dua) oleh beberapa personil, Diklat Rescue oleh 20 orang dan Inspektur. Untuk Diklat Pemadam I (satu) dan II (dua), serta Rescue *outputnya* untuk petugas operasional yang berguna dalam pelaksanaan operasi. Inspektur *outputnya* untuk petugas pemeriksa alat proteksi kebakaran di gedung.

Pembinaan dan pelatihan masih belum optimal karena belum menyentuh seluruh aspek baik itu masyarakat, pihak swasta, lembaga-lembaga serta pelatihan di tingkat personil masih ada petugas yang belum memenuhi standar kualifikasi seperti belum semua personil operasional pemadam kebakaran mengikuti Diklat Pemadam satu (I) atau diklat dasar.

1.5 Sarana Proteksi Kebakaran

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru masih membutuhkan Mobil Pemadam Kebakaran, karena 1 unit Mobil Pemadam Kebakaran dapat menutupi daerah layanan pemadam kebakaran seluas 7,5 km² dan dengan luas Kota Pekanbaru 632,26 km². Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru membutuhkan sebanyak 84 unit Mobil Pemadam Kebakaran (MPK). Nyatanya Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru baru memiliki 17 Unit MPK yang tersebar ke 8 Pos sehingga Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru masih kekurangan 67 Unit MPK.

1.6 Inspeksi Kebakaran

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran melakukan pemeriksaan alat pemadam api ringan (APAR) atau racun api baik itu milik pemerintah atau swasta. Kegiatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dilakukan oleh personil pemadam kebakaran yang telah mengikuti Diklat

Inspektur Pemadam. Inspeksi kebakaran belum optimal karena masih banyak ditemui tempat-tempat usaha dan gedung yang belum memiliki alat pemadam api ringan (apar).

1.7 Pengendalian Bahaya/ Pencegahan

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kota Pekanbaru melakukan Pelatihan Swadaya ke Lembaga Pendidikan, lembaga Kesehatan, Perusahaan, dan lain-lain. Materi yang diajarkan diantaranya Simulasi Tradisional Dan Apar, Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung, Teknik Evakuasi Korban, Pencegahan Dan Praktek Pemadaman Kebakaran, Teori Pencegahan Bahaya Kebakaran, serta Pelatihan Dasar Pemadam Kebakaran. Pelatihan ini diikuti oleh berbagai latar belakang diantaranya lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, perusahaan dan lain-lain. Dengan rincian tahun 2015 diikuti oleh 28 lembaga, perusahaan dll dengan jumlah 1170 peserta. Tahun 2016 diikuti oleh 24 lembaga 2599 peserta. Tahun 2017 diikuti oleh 31 lembaga 2345 peserta.

Untuk langkah preventif ini Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru sudah melakukan pelatihan swadaya dengan cara mendatangi langsung lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, perusahaan dan lembaga lainnya. Tapi langkah ini masih belum optimal karena masih terjadi fluktuasi dan belum semua lembaga atau institusi yang didatangi.

1.8 Tanggap Darurat

Regu pertama sampai di lokasi kebakaran, komandan regu (Danru) menjadi kepala komando operasi diharuskan mencatat *respond time* serta menilai kondisi apakah memungkinkan atau tidak dilakukannya pemadaman. Kalau tidak, maka regu tersebut berupaya agar api tidak menyebar ke obyek lain. Kemudian Danru harus memperhatikan

bahan yang mudah terbakar atau meledak, memperhitungkan risiko dan keselamatan personil regu kemudian mengarahkan formasi untuk personil regu. Terakhir, kepala komando operasi mengkonfirmasi keadaan kepada komandan peleton (Danton) dan operator komunikasi kebakaran serta meminta tambahan regu kalau diperlukan. Apabila diperlukan regu tambahan, maka setelah sampai di lokasi kebakaran, Danru kedua berkoordinasi dengan kepala komando operasi dan berkoordinasi dengan masyarakat di sekitar tempat kejadian untuk mencari sumber air terdekat. Apabila melibatkan 2 regu atau lebih maka kepala komando operasi diserahkan kepada komandan peleton.

Untuk tanggap darurat sudah berjalan dengan baik walaupun belum optimal karena dibebberapa kasus kebakaran waktu tanggap melebihi 15 menit dikarenakan jauhnya jarak lokasi kebakaran dengan pos terdekat, serta karena kondisi lalu lintas yang padat.

1.9 Penyelidikan dan Pelaporan

Kebanyakan kasus kebakaran bangunan yang teridentifikasi yang terjadi di Kota Pekanbaru disebabkan oleh korsleting arus listrik, beberapa kasus disebabkan oleh gas LPG yang bocor dan masih banyak kasus yang masih dalam proses penyelidikan. Dan nantinya akan jadi bahan untuk pelatihan dan sosialisasi untuk masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya. Dan untuk laporan kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru dihubungi via telpon oleh masyarakat disekitar lokasi kebakaran atau dilaporkan langsung ke pos pemadam yang terdekat dari lokasi kebakaran. Untuk penyelidikan dan pelaporan belum berjalan optimal karena masih banyak kasus kebakaran yang belum teridentifikasi penyebabnya.

1.10 Audit Kebakaran

Komandan regu mencatat laporan peristiwa kebakaran seperti jumlah bangunan terbakar, jenis bangunan, luas bangunan, nama pemilik, alamat, *respond time*, tempo pemadaman, perkiraan kerugian pemilik bangunan, penyebab kebakaran, jumlah kerugian BPBPK, MPK yang dikerahkan sampai peleton yang bertugas dan menyerahkan laporan tersebut kepada komandan peleton. Selanjutnya komandan peleton melanjutkan laporan tersebut kepada komandan kompi. Untuk tahap terakhir sudah berjalan dengan baik karena setelah pemadaman selesai komandan regu sudah mencatat laporan peristiwa kebakaran walaupun harus lebih dioptimalkan lagi karena masih banyak kasus kebakaran yang tidak diketahui perkiraan kerugian dari pihak korban atau dari pihak Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam kebakaran.

2. Faktor-Faktor yang Menghambat Penerapan Manajemen Proteksi Kebakaran di Kota Pekanbaru Tahun 2015-2017

2.1 Faktor Internal

a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana BPBPK Kota Pekanbaru

Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran baru memiliki 21 unit Mobil Pemadam Kebakaran sedangkan untuk ukuran luas Kota Pekanbaru dengan mencapai 632,26 km² dengan hitungan 1 unit Mobil Pemadam Kebakaran dapat menutupi daerah layanan pemadam kebakaran dalam setiap WMK adalah wilayah 7,5 km² maka Kota Pekanbaru membutuhkan 84 unit Mobil Pemadam Kebakaran, sedangkan yang ada hanya 21 unit Mobil Pemadam Kebakaran. Jadi Kota Pekanbaru membutuhkan tambahan 63 unit Mobil Pemadam Kebakaran lagi. Sedangkan untuk kebutuhan Pos Pemadam Kebakaran, 1 pos pemadam memiliki 2 unit MPK jadi dari total 84 MPK akan ditempatkan di 42 pos.

b. Kurangnya SDM

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru membutuhkan petugas pemadam kebakaran sebanyak 504 orang, sedangkan petugas yang ada hanya sebanyak 185 orang. Serta perlu diadakan pendidikan dan pelatihan kepada Personil-personil Badan Penanggulangan Bencana dan pemadam kebakaran Kota Pekanbaru.

c. Sosialisasi yang Belum Optimal

Sosialisasi kepada masyarakat melalui bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, Lembaga Pendidikan, Fasilitas Kesehatan, Perusahaan, dan lain-lain dirasa kurang cukup, seperti Program Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Dini dan Evakuasi Korban Kebakaran baru dilaksanakan satu kali dari tahun 2015 sampai 2017 dan hanya melibatkan 400 orang dari 58 kelurahan. Sedangkan pada tahun 2017 ada pemekaran kelurahan menjadi 83 kelurahan dengan tambahan 25 kelurahan baru yang tersebar di 7 kecamatan. Serta penyuluhan dan pelatihan Swadaya belum ke semua Lembaga Pendidikan, lembaga Kesehatan, Perusahaan, dan lain-lain.

2.2 Faktor Eksternal

Lamanya waktu tempuh oleh Mobil Pemadam Kebakaran ke lokasi kebakaran yang melebihi waktu tanggap (*respond time*) selama 15 menit. Penyebab keterlambatan petugas pemadam kebakaran ke lokasi kejadian kebakaran biasanya lalu lintas padat, jam sibuk, gang sempit, gapura yang rendah, portal yang dikunci, marka kejut, parkir sembarangan serta kesadaran berlalu lintas masyarakat yang masih rendah dan kerumunan masyarakat yang menonton peristiwa kebakaran yang mengganggu jalannya pelaksanaan tugas pemadam kebakaran.

Kesimpulan

Didalam penerapan manajemen proteksi kebakaran meliputi Kebijakan Manajemen; Organisasi dan Prosedur; Identifikasi Bahaya Kebakaran; Pembinaan dan Pelatihan; Sarana Proteksi Kebakaran; Inspeksi Kebakaran; Pengendalian Bahaya /Pencegahan; Tanggap Darurat; Penyelidikan dan Pelaporan; Audit Kebakaran sudah berjalan dengan baik tapi itu semua belum optimal dan harus ditingkatkan lagi. Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penerapan manajemen proteksi kebakaran adalah keterbatasan sarana dan prasarana dikarenakan anggaran yang kurang dari pemerintah kota Pekanbaru; kurangnya SDM; hambatan situasional dan sosialisasi yang belum optimal baik itu melalui bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, Lembaga Pendidikan, Fasilitas Kesehatan, Perusahaan, dan lain-lain.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, penulis ingin menyampaikan saran bahwa kepada Pemerintahan Kota Pekanbaru harus membenahi dan mengupayakan peningkatan sumber daya di dalam Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana, dan sosialisasi harus ditingkatkan mengingat hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan manajemen proteksi kebakaran di kota Pekanbaru. Kepada masyarakat agar lebih tanggap dan berperan aktif dalam masalah kebakaran dan lebih memperhitungkan pembuatan gapura, portal, marka kejut, tidak membuat kerumunan yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan tugas pemadam kebakaran dan lebih memprioritaskan mobil pemadam kebakaran saat berada di jalan raya.

Daftar Pustaka

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Kencana, Inu syafie. 2011. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE-UII.
- Napitupulu, Paimin dan Biatna Dulbert. 2015. *Sistem Proteksi Kebakaran Kawasan Pemukiman dan Perkantoran*. Bandung: P.T. Alumni.
- Nawawi, Zaidan. 2014. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ramli, Soehatman. 2010. *Manajemen Kebakaran*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Rijanto, Budi. 2010. *Kebakaran & Perencanaan Bangunan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Setiawan, Dharma Salam. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Syafiq, Ahmad dan Sandra Fikawati (Ed.). 2012. *Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Banjir*

dan Kebakaran. Jakarta: UI-Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang - Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota pekanbaru Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Internet

- <http://pekanbaru.tribunnews.com/amp/2015/04/03/bpbd-damkar-pekanbaru-kekurangan-152-personil/> diakses 4 juli 2019.
- <http://www.segmennews.com/2017/06/20/dpkp-kota-pekanbaru-terus-tingkatkan-sosialisasi-dan-layanan-masyarakat/> diakses 4 juli 2019.